

KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia



DANA INSENTIF DESA (DINDA)

Apa itu DINDA?

Mekanisme baru dimana pemerintah kabupaten memberikan insentif fiskal kepada desa terpilih sebagai penghargaan atas perbaikan kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan desa serta bidang tata kelola layanan dasar dan ekonomi desa.

Mengapa DINDA relevan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa?

Saat ini pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki penilaian kinerja tahunan dan insentif yang terkait dengan Dana Insentif Daerah (DID). Namun belum ada mekanisme penilaian dan pemberian insentif yang sistematis untuk kecamatan dan perangkat desa di semua lokasi. Inilah yang mengilhami pengembangan desain DINDA di level kabupaten. Untuk itu kabupaten perlu mengembangkan instrumen untuk mengukur kinerja desa dalam pengelolaan keuangan desa, pemanfaatan Dana Desa, dan peningkatan layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat desa.

Bagaimana hasil uji coba DINDA di Kabupaten Bima dan dampaknya?

Uji coba diawali dengan pengembangan indikator DINDA yang berbasis kebutuhan lokal berdasarkan indikator DID, evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, RPJMD, visi dan misi bupati, serta indikator lokal terkait lainnya. Penyusunan indikator DINDA dilakukan secara partisipatif yang diikuti oleh perwakilan dari OPD kabupaten, kecamatan, dan desa. Saat ini tanggung jawab proses pelaksanaan DINDA berada dibawah koordinasi DPMDes Kabupaten Bima. Setelah perangkat indikator disepakati, selanjutnya ditetapkan mekanisme pendanaan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati untuk mengawal pelaksanaannya.

Penilaian kinerja desa dilakukan oleh tiap kecamatan melalui tim PTPD dan perangkat kecamatan. Masing-masing kecamatan menominasikan 3 desa dengan kinerja terbaik ke kabupaten. Selanjutnya, DPMDes kabupaten akan melakukan verifikasi dan penilaian final bersama OPD terkait untuk memilih 20 desa terbaik sebagai penerima Dana Insentif Desa. Alur proses DINDA selengkapnya dijelaskan pada gambar di bawah ini:



Dari evaluasi pelaksanaan DINDA tahun 2018 di Bima, DINDA sudah mampu menjadi mesin penggerak kecamatan dan desa dalam memperbaiki tata kelola layanannya seperti:

- Perubahan perilaku proses perencanaan pembangunan desa (lebih partisipatif, inklusif, dan mendorong tepat waktu penyelesaiannya).
- Perubahan alokasi penganggaran untuk program-program terkait pelayanan dasar (terkonfirmasi dalam RKPDes-APBDes).
- Mendorong perubahan pola binwas tim kecamatan dalam mendampingi desa, berdasarkan indikator keberfungsian tim PTPD dan KDM dalam pelaksanaan penilaian DINDA.

Di tahun pertama ujicoba DINDA (2018), 48 dari 191 desa di Kabupaten Bima telah memenuhi semua indikator DINDA. Selain itu, 48 desa ini juga mampu menetapkan APBDes dua bulan lebih cepat dari sebelumnya, dengan alokasi pelayanan dasar sebesar minimal 20%, serta anggaran yang lebih berpihak kepada kelompok miskin dan rentan.

Dari pelaksanaan di tahun pertama 2018, ditetapkan 20 desa penerima DINDA dari 191 desa di kabupaten Bima. Uji coba DINDA di Bima ini merupakan kerja sama antara KOMPAK dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu.

Di 2019, KOMPAK mendorong replikasi DINDA ke Kabupaten Bantaeng, Sumbawa, Aceh Barat, Bener Meriah, dan Lumajang. DINDA juga diperluas di tingkat Provinsi dan diujicobakan oleh Provinsi Jawa Timur.

Apa saja keunikan DINDA sehingga dapat meningkatkan kualitas alokasi dana ke desa?

- Indikator penilaian yang dibuat bersama oleh kecamatan, kabupaten serta OPD dari berbagai sektor membangun keselarasan perencanaan dan kegiatan antara desa dengan OPD berbagai sektor, termasuk dalam penyediaan layanan dasar.
- Desain pemeringkatan desa menggunakan indikator yang berbasis kebutuhan lokal, sehingga merefleksikan kondisi riil jika dibandingkan dengan indikator yang berlaku secara nasional.
- Penilaian lebih optimal karena dilakukan oleh unsur terdekat desa yaitu kecamatan dan kabupaten. Jika dibandingkan dengan penilaian oleh kementerian, kecamatan dan kabupaten jauh lebih mengenal karakteristik dan perkembangan desa-desanya.
- Melalui proses penilaian, kecamatan dan kabupaten juga mendapatkan data kebutuhan dan kinerja dari seluruh desa. Hal ini berguna dalam merencanakan penguatan dan pembangunan desa.

Rekomendasi tindak lanjut

1. Memperbaiki Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Desa agar terbangun kesamaan paradigma antar pemangku kepentingan terkait (kecamatan, desa, dan OPD sektor).
2. Mengoptimalkan peran OPD teknis dalam mensinergikan capaian program sektor dengan kegiatan dan kewenangan desa.
3. Memperkuat kapasitas desa-desa yang nilainya rendah melalui pendampingan.